



## **Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Program Rumah Layak Huni Sehat Di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara**

### ***Reducing Poverty Rates Through the Social Rehabilitation Program for Healthy Livable Homes in Monano District, North Gorontalo Regency***

**Yohana Dizca Ayunani<sup>1</sup>, Bala Bakri<sup>2</sup>, Swastiani Dunggio<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ihsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Email: yohanadizca246@gmail.com, bala\_bakri@yahoo.co.id, swastianidunggio@yahoo.co.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan angka kemiskinan melalui rehabilitasi sosial program rumah layak huni sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Informasi didapatkan melalui wawancara pada aparat kecamatan dan aparat desa. Dokumentasi gambar pembangunan rumah layak sehat diambil pada desa terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan program pembangunan rumah layak huni sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara belum signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan karena program pembangunan rumah layak huni sehat merupakan bantuan dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang berupaya membuat hidup lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup lebih baik.

**Kata Kunci : penurunan angka kemiskinan; rehabilitasi sosial**

#### **Abstract**

*This study aims to determine the reduction of poverty through the rehabilitation of social programs for healthy habitable houses in Monano District, North Gorontalo Regency. This research is a qualitative research with descriptive analysis. Information obtained through interviews with district officials and village officials. Documentation of pictures of the construction of healthy decent houses was taken in the related villages in this study. The results of the study show that the development program for healthy habitable houses in Monano District, North Gorontalo Regency has not been significant in reducing poverty because the healthy housing development program is an aid in improving social welfare that seeks to make life better and improve quality of life better.*

**Keywords: reduction of poverty rate; social rehabilitation**

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang besar, baik jumlah penduduk yang besar, hutang yang besar dan penduduk miskin yang juga besar. Kemiskinan ini merupakan amanah konstitusi dan menjadi tanggungjawab Negara Indonesia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara." yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di mana Negara mempunyai kewajiban memenuhi

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya. (Undang-Undang No 13 Tahun 2011, 2011)

Berbagai program dari pemerintah pusat dan daerah pun bermunculan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program pemerintah yang sudah dijalankan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di sini hanya pada dua masa pemerintahan orde reformasi. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya, maka dibagi dua, yaitu program zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, untuk melengkapi khazanah program penanggulangan kemiskinan juga terdapat program spesifik yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang telah banyak memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin dan PMKS.

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu : (1) Pro-pertumbuhan untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi; (2) Pro-Lapangan Kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja; (3) Pro-Masyarakat Miskin agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat

Program penanggulangan pada era pemerintahan Presiden Jokowi adalah melanjutkan agenda pemerintahan sebelumnya, yaitu dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan di mana pada tanggal 3 November 2014 ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 166 tahun 2014 (Perpres RI No 166 Tahun 2014, 2014) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perpres RI No 166 Tahun 2014, 2014). Program tersebut terdiri dari 3 program, yaitu program usaha ekonomi kecil dan mikro, program pemberdayaan masyarakat, dan program bantuan sosial. Ditambah dengan program Kartu Sakti Jokowi yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Kemiskinan merupakan masalah utama di setiap provinsi di Indonesia. Tak terkecuali dengan Provinsi Gorontalo yang menempati posisi ke 27 dari total 34 provinsi. Provinsi Gorontalo tergolong provinsi yang masih muda. Namun jumlah kemiskinan di Provinsi Gorontalo mencapai 371.000 jiwa pada tahun 2019. Meskipun jumlah kemiskinan di Provinsi Gorontalo tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, kenyataannya akan sangat berbeda apabila kita melakukan observasi secara langsung di Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten se-Provinsi Gorontalo akan disajikan pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018**

Wilayah Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (Ribu Jiwa)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Boalemo	30.5	32.19	32.29	34.35	32.83
Gorontalo	77.66	80.52	78.36	76.93	74.69
Pohuwato	29.85	32.7	31.66	32.56	30.39
Bone Bolango	25.31	28.19	27.8	27.91	27.61
Gorontalo Utara	20.15	21.06	20.65	21.67	21.09
Kota Gorontalo	11.64	12.18	12.43	11.95	11.91

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2020

Melalui tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah kemiskinan di Provinsi Gorontalo paling banyak terdapat pada Kabupaten Gorontalo dengan total masyarakat miskin mencapai 746.900 pada tahun 2018. Disusul oleh Kabupaten Boalemo dengan total masyarakat miskin mencapai 328.300 pada tahun 2018 dan Kabupaten Pohuwato menempati posisi ketiga dengan total masyarakat miskin pada tahun 2018 mencapai 303.900.

Pada posisi keempat ditempati oleh Kabupaten Bone Bolango dengan total masyarakat miskin mencapai 276.00 jiwa. Pada posisi kelima ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan total masyarakat miskin mencapai 210.900, dan posisi terakhir ditempati oleh Kota Gorontalo dengan total masyarakat miskin hanya mencapai 119.100 jiwa.

Meskipun Kabupaten Gorontalo Utara menempati posisi ke 5 se-Provinsi Gorontalo dengan total masyarakat miskin hanya 210.900 pada tahun 2018, namun apabila dilakukan observasi secara langsung terhadap kondisi perumahan penduduk terutama pada Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut akan sangat tinggi dikarenakan rumah yang dimiliki sebagian besar penduduk merupakan rumah tidak layak huni berukuran kurang dari 4x4 m<sup>2</sup> yang didirikan dari sisa-sisa pembuangan perusahaan jasa pemotongan kayu log (*sawmill*) dan tidak adanya WC pribadi sehingga terkesan kumuh.

Dari fenomena inilah salah satu upaya pemerintah muncul dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, yakni dengan pembangunan rumah layak huni sehat sejalan dengan penelitian haryati dan nugraha. (Haryati Roebyantho, 2014; Nugraha, 2014). Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara serta Untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis sejalan dengan penelitian (Kamaludin, Arman, & Dunggio, 2021)(Ma'ruf, P. ., Sakir, M., & Bau, 2021; Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, 2021). Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana peran program pembangunan rumah layak huni sehat di Kabupaten Gorontalo Utara dalam membantu menurunkan angka kemiskinan khususnya di Kecamatan Monano. Sumber data yang digunakan adalah Sumber primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2018) Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, di peroleh data yang di anggap kredibel. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pembangunan Rumah Layak Huni (mahyani) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Namun pada tahun 2018 bantuan program rumah layak huni berubah menjadi rumah sehat yang disertai dengan jamban/WC untuk mencegah masyarakat melakukan buang air besar sembarangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara serta untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Namun mengingat luas wilayah kecamatan ini  $\pm 296,71 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari 10 desa, maka peneliti hanya mengambil sampel penelitian pada tiga desa yaitu : Desa Monano, Desa Monas dan Desa Sogu.

Ketiga desa tersebut penulis jadikan sampel penelitian disebabkan karena letak yang saling berdekatan serta merupakan tiga desa dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Monano yang berarti bahwa kemungkinan keluarga miskin penerima bantuan rumah layak huni sehat juga tinggi.

Berikut adalah data penerima program bantuan rumah layak huni sehat di tiga desa :

**Tabel 2 Data Penerima Mahyani Tahun 2015-2019**

<b>No</b>	<b>Nama Penerima</b>	<b>Tahun Menerima Bantuan</b>	<b>Alokasi Dana</b>
1	Hendrik Pusung	2015	Rp 26.000.000,-
2	Azis Mahmud	2015	Rp 26.000.000,-
3	Ali Y Saha	2015	Rp 26.000.000,-
4	Erik G Jama	2015	Rp 26.000.000,-
5	Samin Salehe	2015	Rp 26.000.000,-
6	Raman Datau	2016	Rp 26.000.000,-
7	Susu Suna	2016	Rp 26.000.000,-
8	Risno Mohi	2016	Rp 26.000.000,-
9	Hasdi Manto	2016	Rp 26.000.000,-
10	Husain Dambu	2016	Rp 26.000.000,-
11	Hamrain Saha	2016	Rp 26.000.000,-
12	Abd. Rahman Puji	2016	Rp 26.000.000,-
13	Ratna Karim	2017	Rp 26.000.000,-
14	Abd. Azis Otoluwa	2017	Rp 26.000.000,-
15	Ridwan Sali	2017	Rp 26.000.000,-
16	Saiful Huntu	2017	Rp 26.000.000,-
17	Abdul Gias Patila	2017	Rp 26.000.000,-
18	Lisbet Oliy	2017	Rp 26.000.000,-
19	Salma Daud	2017	Rp 26.000.000,-
20	Sangga Suna	2018	Rp 26.000.000,-
21	Herlina Abas	2018	Rp 26.000.000,-
22	Dewi Otoluwa	2018	Rp 26.000.000,-
23	Salim Alhasni	2018	Rp 26.000.000,-
24	Kisman Mahmud	2018	Rp 26.000.000,-
25	Uyun Abdullah	2018	Rp 26.000.000,-
26	Yanto Maunte	2018	Rp 30.000.000,-
27	Mustapa Puji	2018	Rp 30.000.000,-
28	Ridwan Palilati	2018	Rp 30.000.000,-
29	Lilis Otoluwa	2019	Rp 30.000.000,-
30	Anita Karim	2019	Rp 30.000.000,-
31	Rulli Dunggio	2019	Rp 30.000.000,-
32	Hasan Aduka	2019	Rp 30.000.000,-
33	Usman K. Jama	2019	Rp 30.000.000,-
34	Roflan Pulumoduyo	2019	Rp 33.000.000,-
35	Apik S. Diko	2019	Rp 33.000.000,-
36	Iwan Nuntu	2019	Rp 33.000.000,-
37	Saripa Pinangi	2019	Rp 37.000.000,-
38	Nurdin Koha	2019	Rp 37.000.000,-
39	Yudin Harun	2019	Rp 37.000.000,-
40	Idrus Kasim	2019	Rp 37.000.000,-

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dana yang dianggarkan dalam program pembangunan rumah layak huni pada tahun 2015 – 2018 hanya berkisar Rp 26.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai Rp 30.000.000–Rp 37.000.000. Kenaikan anggaran ini disebabkan karena program rumah layak huni berubah menjadi rumah sehat.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah bagan teks yang bersifat naratif.

Dari uraian tersebut, hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat disajikan sebagai berikut : Pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan secara swakelola bahkan swadaya dalam artian anggaran mengalami peningkatan. Kecamatan Monano pada tahun 2019 lebih dari 30 (tiga puluh) juta rupiah yang sebelumnya hanya berkisar 26 (dua puluh enam) juta rupiah. Jadi pelaksanaannya melalui dana desa yang dianggarkan lebih dari 30 (tiga puluh) juta rupiah, untuk swadaya dari penerima. Swadaya dalam bentuk misal standar mahyani tidak ada teras, penerima menambahkan bahan melalui swadaya untuk pembangunan teras atau ingin menambah ukuran penerima menambah bahan karena pemerintah tidak menganggarkan lebih dari 30 (tiga puluh) juta rupiah. Dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara belum terlalu signifikan untuk penurunan kemiskinan. Karena mahyani bukan berupa modal atau kegiatan ekonomi Keadaan penerima yang sebelumnya hidup dalam keadaan kumuh menjadi lebih sehat karena mahyani diikuti dengan pembangunan jamban (WC). Faktor penghambat dalam program pembangunan mahyani adalah pada saat verifikasi data terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti lahan kepemilikan, akan tetapi sebagian besar tidak memiliki lahan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara sudah berjalan dengan baik. Kehidupan masyarakat di Kecamatan Monano Gorontalo Utara telah mengalami kenaikan kualitas hidup menjadi lebih layak. Namun untuk dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara belum terlalu signifikan karena program bantuan rumah layak huni bukan merupakan bantuan modal. Program bantuan rumah layak huni merupakan program peningkatan kesejahteraan sosial.; Saran; Diharapkan kepada masyarakat segera mengurus surat kepemilikan tanah sehingga pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat lebih tepat sasaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Haryati Roebyantho, N. U. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan

- Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat Implementation of Poverty Alleviation Policy Through Social Rehabilitation for Adequate Dwelling in Garut. *Sosio Konsepsia*, 4(1), 311–330. <https://media.neliti.com/media/publications/52922-ID-implementasi-kebijakan-penanggulangan-ke.pdf>
- Kamaludin, Arman, & Dunggio, S. (2021). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–17. <https://ejournal.unisan.ac.id/index.php/jipik/article/view/16>
- Ma'ruf, P., Sakir, M., & Bau, H. (2021). Birokrasi Pelayanan Publik di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 34–49.
- Nugraha, A. F. (2014). *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang*. 1–201.
- Perpres RI No 166 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. 184, 1–27.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 18–33.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2011. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*.